

# **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DENGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI MODERASI PADA PROVINSI PAPUA BARAT 2021-2024**

**Sherly Yanti<sup>1</sup>, Sri Nurmayanti<sup>2</sup>, Khuzafah<sup>3</sup>, Muhammad Ikram<sup>4</sup>, Nurfadilah<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Palopo

e-mail: [2204040013@uinpalopo.ac.id](mailto:2204040013@uinpalopo.ac.id)<sup>1</sup>, [2204040002@uinpalopo.ac.id](mailto:2204040002@uinpalopo.ac.id)<sup>2</sup>,

[2204040004@uinpalopo.ac.id](mailto:2204040004@uinpalopo.ac.id)<sup>3</sup>, [muhammadikrams@uinpalopo.ac.id](mailto:muhammadikrams@uinpalopo.ac.id)<sup>4</sup>, [nurfadilah@uinpalopo.ac.id](mailto:nurfadilah@uinpalopo.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstrak** – Tujuan Penelitian: Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemampuan mandiri fiskal dan juga menguji sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah bertindak sebagai variable moderasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat periode 2021–2024. Metodologi: Penelitian menggunakan metode kuantitatif berbasis data sekunder DJPK dengan 28 observasi dan dianalisis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Namun, kinerja keuangan tidak memoderasi hubungan tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak selalu diperkuat oleh kinerja keuangan di daerah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah. Kontribusi: Studi ini penting dengan menghadirkan bukti empiris terbaru dari Papua Barat yaitu wilayah dengan struktural fisik unik dan jarang diteliti, serta memperkaya literatur mengenai hubungan PAD, kinerja keuangan, dan kemandirian fiskal.

**Kata Kunci:** PAD, Kemandirian Fiskal, Kinerja Keuangan.

**Abstract** – Purpose: This study aims to examine how Local Own-Source Revenue (PAD) affects fiscal autonomy and to test the extent to which local government financial performance acts as a moderating variable for district/city local governments in West Papua Province for the period 2021–2024. Methodology: The study uses a quantitative method based on secondary data from the DJPK with 28 observations and is analysed using Moderated Regression Analysis (MRA). Research Findings: The results show that PAD has a positive and significant effect on fiscal autonomy. However, financial performance does not moderate this relationship. These findings confirm that an increase in PAD is not always reinforced by financial performance in regions with low levels of fiscal autonomy. Contribution: This study is important in that it presents the latest empirical evidence from West Papua, a region with unique physical structures that has been rarely studied, and enriches the literature on the relationship between PAD, financial performance, and fiscal independence.

**Keywords:** PAD, Fiscal Autonomy, Financial Performance.

## **PENDAHULUAN**

Tingkat kemandirian fiskal berfungsi sebagai tolak ukur utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai agenda kerjanya tanpa terlalu bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia, seperti Provinsi Papua Barat, masih memiliki kemandirian fiskal yang kurang optimal. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kapasitas fiskal daerah dan tingginya ketergantungan pada sumber pendanaan dari pusat (DAU, DAK, dan Dana Otsus) menjadi bukti keterbatasan ini.

Secara teoritis, PAD berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal. Namun, hasil studi terdahulu tidak menunjukkan konsistensi. Ada penelitian yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkorelasi positif dengan kemandirian fiskal, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum tentu meningkatkan

kemandirian fiskal karena lemahnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuka ruang untuk mempertimbangkan faktor lain, seperti kinerja keuangan pemerintah daerah, yang diduga dapat memperkuat hubungan antara PAD dan kemandirian fiskal. Meski demikian, penelitian tentang peran kinerja keuangan sebagai variabel moderasi masih terbatas, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) fokus pada Papua Barat yang jarang diteliti dan memiliki karakter fiskal unik; (2) penggunaan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi dalam hubungan PAD dan kemandirian fiskal; serta (3) pemanfaatan data terbaru 2021–2024 pascapandemi yang memberikan gambaran lebih relevan terhadap kondisi fiskal daerah saat ini.

Bertolak dari latar belakang tersebut, riset ini dilaksanakan untuk melakukan analisis mengenai pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal serta menguji apakah kinerja keuangan memoderasi hubungan tersebut pada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara Indonesia terbagi menjadi dua aspek utama: (1) memberikan perlindungan bagi segenap bangsa serta seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, dan (2) memajukan kesejahteraan public, mencerdaskan kehidupan warga negara, dan berperan aktif dalam menciptakan ketertiban global yang didasari oleh kemerdekaan, perdamaian yang lestari, serta keadilan sosial. Demi mencapai visi negara tersebut, kolaborasi erat antara otoritas pusat dan daerah sangatlah esensial, mengingat struktur NKRI yang terdiri dari satuan-satuan administrasi berupa provinsi, kabupaten, dan kota.(Kiki Zakiah, 2022)

Pemerintah daerah, yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota, menjalankan kewenangan otonom setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan otonom daerah pada tahun 1999. Landasan hukum kebijakan ini awalnya adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui beberapa kali, dengan regulasi paling mutakhir adalah UU N. 12 Tahun 2008 (Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004). Kemandirian daerah ditetapkan sebagai salah satu target yang ingin dicapai melalui desentralisasi ini. Oleh karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi elemen fiskal yang esensial dalam upaya pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di wilayah masing-masing untuk mewujudkan kemandirian tersebut. (Mulya Firdausy, 2017).

Sebagai salah satu elemen penting dalam kebijakan fiskal nasional, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai indikator nyata dari desentralisasi ekonomi pemerintahan Indonesia. Data historis menunjukkan bahwa PAD secara keseluruhan di Indonesia mencapai Rp5516,1 miliar pada tahun 2022, dan sebagian besar wilayah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Perkembangan yang signifikan ditunjukkan oleh Provinsi Jawa Timur, yang pada tahun 2004 meraih realisasi PAD tertinggi di Indonesia. Kinerja keuangan Jawa Timur sangat impresif, dimana mereka berhasil membukukan Rp23,45 triliun, melampaui 111,21% dari target awal mereka sebesar Rp21,08 triliun. (Faizar, n.d.) Capaian ini mencerminkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana PAD terealisasi sebesar Rp22,317 triliun. Secara keseluruhan, total pendapatan daerah Jawa Timur mencapai Rp35,47 triliun atau 110,32% dari target Rp32,16 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp23,45 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp11,95 triliun (108,61% dari target), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp68,75 miliar (107,95% dari target). Di sisi lain, realisasi belanja daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp34,56 triliun atau 96,14% dari anggaran sebesar Rp35,95 triliun. Dengan pendapatan yang melebihi belanja, Jawa Timur berhasil mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp918,49 miliar, berbanding terbalik dengan prediksi defisit sebesar Rp3,78 triliun dalam APBD. Capaian ini menunjukkan tata kelola fiskal yang baik dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi indikator penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur.(Yayuk Musrini & Muhammad Aufa, 2024)

Hubungan antara prinsipal dan agen dideskripsikan oleh Teori Keagenan melalui penggunaan mekanisme kontrak. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Jensen & Meckling, menganggap hubungan keagenan sebagai kontrak dimana prinsipal menyerahkan sebagian kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Ciri khas sistem pemerintahan yang deokratis adalah adanya rantai keagenan, seperti hubungan antara warga negara (prinsipal) dan pemerintah (agen), atau pemerintah pusat (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen). Pemerintah daerah, sebagai pihak yang menerima pendeklarasi wewenang dari pusat, memiliki kewajiban ganda (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang didelegasikan, dan (2) berupaya keras mencapai tingkat kesejahteraan tertinggi bagi masyarakat. (Evlyn & Rahayu, 2018)

Namun, karena adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah, yakni bahwa pemerintah daerah mungkin tidak selalu beroperasi demi kepentingan terbaik masyarakat. Untuk memitigasi resiko ini, diperlukan pengukuran kinerja keuangan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tanggung jawab fiskalnya dengan baik.(Marentek et al., 2022)

Di era desentralisasi, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri agar mampu mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik yang prima. Kendati demikian, tingkat kemandirian fiskal di hampir seluruh wilayah Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Indikasi utama dari kondisi ini adalah ketergantungan yang tinggi pada dana yang ditransfer dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utama daerah. Data yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkonfirmasi bahwa per tahun 2024, kemandirian fiskal Provinsi Papua Barat masih berada pada level yang sangat rendah, dengan rasio sekitar 6,1%, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemandirian fiskal terendah di Indonesia. Kondisi ini menegaskan tingginya ketergantungan daerah pada dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). (Fahrizal & Sukartini, 2024). Walaupun terdapat upaya dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemaksimalan pemungutan pajak daerah, kontribusinya terhadap total pendapatan masih minim. Di sisi lain, kinerja keuangan daerah dalam penyerapan anggaran cukup baik, dengan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 91,78% dan Transfer ke Daerah sebesar 98,48%. Fenomena ini menunjukkan pentingnya strategi fiskal yang lebih efektif untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri.(Apriliansyah, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Devitriana Darmawati & Rizka Jafar (2024) di Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal.(Rizka Jafar Darmawati, 2024) hasil ini didukung oleh temuan Mohammad Wasil et al. (2021) di Kabupaten Sidoarjo, yang juga menggarisbawahi dampak positif dan signifikan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.(Wasil et al., 2020)

Sementara penelitian yang dilakukan Retno Rosdiana (2020) Penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kemandirian fiskal.(Urfah, 2024) konsistensi dengan literatur, penelitian oleh Riyandri Yulmi Deswita (2022) yang berlokasi di Kota Payakumbuh mengungkap adanya kontradiksi internal. Secara individual, pajak daerah merupakan salah satu unsur pembentuk PAD tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, ketika ditinjau secara bersamaan, komponen-komponen PAD secara keseluruhan menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dalam mendorong kemandirian fiskal. (Deswita, 2024)

Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya gap dalam literatur mengenai pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan ini antara lain kondisi ekonomi daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan periode penelitian.

Untuk menjembatani perbedaan hasil tersebut, kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara PAD dan kemandirian fiskal. Kinerja keuangan daerah mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah. Dengan kinerja keuangan yang baik, peningkatan PAD diharapkan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

Peran kinerja keuangan daerah sebagai variabel moderasi telah didukung oleh berbagai penelitian. Salah satunya penelitian Oktaviana (2020) yang membuktikan bahwa variabel ini meningkatkan pengaruh positif dari PAD terhadap kemandirian fiskal. (Pramesti, 2020) lebih lanjut, temuan dari Oktavia dan Handayani (2021) menunjukkan adanya pengaruh langsung yang signifikan dari kinerja keuangan daerah terhadap kemandirian fiskal. (Frijunita, 2024)

Setelah meninjau latar belakang yang menguraikan kaitan antara sistem akuntansi dan kualitas laporan keuangan, peneliti memutuskan untuk mengangkat sebuah studi dengan judul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi Pada Konteks Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021-2024"

### **Tujuan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang tersebut, focus utama penelitian ini adalah menguji dampak PAD terhadap kemandirian fiskal dan mencari bukti apakah kinerja keuangan memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam studi ini, digunakan data sekunder yang dikumpulkan untuk rentang waktu tahun 2021 sampai 2024. Sumber data sekunder ini adalah informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tersedia pada portal daring resmi milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan program aplikasi SPSS, yang mencakup analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable dependen dan menentukan sejauh mana variabel moderasi memengaruhi (memoderasi) interaksi antara kedua variable utama. (Faizah, 2022).

### **Populasi**

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan elemen atau kumpulan data yang menjadi dasar penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian. Cooper dan Emory menekankan bahwa populasi adalah kumpulan elemen yang dapat ditarik kesimpulannya, sedangkan Somantri menegaskan bahwa populasi berkaitan dengan data yang dimiliki, bukan pada objek (orang atau benda) itu sendiri. Sementara Sugiyono berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Deswita, 2020) Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat yang berjumlah 12 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder (Time Series) selama periode 2021-2024.

### **Sampel**

Sampel dapat didefinisikan sebagai bagian kecil dari populasi yang dipilih melalui prosedur tertentu (Sudjana) dan dianggap mewakili keseluruhan populasi (Arikunto) untuk kepentingan penelitian yang dilakukan. Secara esensial, sampel adalah sumber data aktual dalam suatu studi. (Amin, 2023) secara konseptual, sampel didefinisikan sebagai subset yang

representative yang diambil dari populasi, berfungsi sebagai sumber data actual dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, khususnya Purposive sampling. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria Purposive Sampling:

1. Unit sampel merupakan Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat
2. Tersedia data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang lengkap dan konsisten (tidak ada data hilang) selama periode observasi
3. Sumber data diakses melalui website resmi Kementerian Keuangan Direktorat jenderal perimbangan keuangan (DJPK)

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Karena periode penelitian mencakup 4 tahun (2021-2024) maka jumlah total unit observasi yang digunakan dalam analisis adalah 28 sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Asumsi klasik

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

N	Unstandardized Residual	
	Mean	0.0000000
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	12.62541714
Most Extreme Differences	Absolute	0.143
	Positive	0.123
	Negative	-0.143
Test Statistic		0.143
Asymp. Sig.(2-tailed) <sup>c</sup>		0.149

Berdasarkan tabel yang tersedia, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh adalah 0,149. Karena nilai signifikansi 0,149 lebih besar dari tingkat signifikansi (a) 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>		
	Collinearity Statistics		VIF
	Tolerance		
1	SQRT_X	0.411	2.434
	SQRT_Z	0.411	2.434

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Toleransi variable X sebesar  $0.411 > 0,10$  dan variable moderasi sebesar  $0,411 > 0,10$ . Dan nilai VIF variable X sebesar  $2.434 < 10,00$  dan variable moderasi sebesar  $2.434 < 10.00$  maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	12.267	2.095		5.857	0.000

PAD	0.062	0.034	1.167	1.830	0.079
Kinerja Keuangan Pemerintah	-4.773	2.359	-1.291	-2.024	0.054

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variable X (PAD) dan Z (Kinerja Keuangan Pemerintah) mempunyai nilai Sign  $> 0.005$  artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Auto Korelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989 <sup>a</sup>	0.978	0.977	13.12072	1.643

Diketahui:

D=1,643

Du= 1,5596

4-du= 4-1,5596=2,4404

Berdasarkan nilai pada tabel, terlihat bahwa  $dU < d < 4 - dU$ , yaitu  $1,5596 < 1,643 < 2,4404$ . Dengan demikian, hipotesis nol dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model

## 2. Uji Hipotesis

Table 1. Uji T

Model		Standardized Coefficients Beta		t	Sig.
1	(Constant) 5,829	3,465		1,682	0,105
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,598	0,056	1,088	10,720	0,000
	KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH - 4,008	3,902	-0,104	-1,027	0,314

Berdasarkan tabel di atas bahwa pendapatan asli daerah ( PAD ) memeliki nilai t hitung sebesar 10,720 dan nilai singnifikan ( Sig ) sebesar 0,000 karena nilai tersebut  $0,000 < 0,05$  artinya PAD berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sementara kinerja keuangan pemerintah memeliki nilai t terhitung sebesar -1,027 dan nilai sig 0,314, maka nilai tersebut  $0,314 > 0,05$  artinya kinerja keuangan pemerintah tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Table 2. Uji Koefisien Determinansi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.989 <sup>a</sup>	0,978	0,977	13,12072	

Berdasarkan tabel di atas regresi ini memeliki kemampuan yang sangat baik karena nilai R<sup>2</sup> yang mendekati 1 ( 97,8% ) artinya Tingkat kecocokan model yang tinggi.

Berdasarkan tabel di atas hubungan sangat kuat ( R = 0,989 ) PAD 97,8% variasi variabel dependen ( R<sup>2</sup>=0,978 ) artinya keselahan prediksi rendah error = 13,12072.

Table 3. Uji MRA

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B					
1	(Constant)	13,442	9,251		1,453	0,159
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,536	0,090	0,975	5,973	0,000
	KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH	-9,299	7,131	-0,242	-1,304	0,205
	XZ	0,011	0,012	0,250	0,888	0,383

Berdasarkan tabel di atas B = 0,536, t = 5,973, Sig = 0,000 B = -9,299, Sig = 0,205 dan XZ, B = 0,011, Sig. = 0,383 artinya tidak berpengaruh sig karena nilai di atas 0,05

### Pembahasan

#### 1. Pengaruh Pad Terhadap Kemandirian Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah di Provinsi Papua Barat. Kesimpulan ini menegaskan bahwa terdapat hubungan positif dan kuat antara kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, semakin besar jumlah PAD yang berhasil dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah Papua Barat, semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. Peningkatan PAD secara otomatis mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dana yang berasal dari Pemerintah Pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan stabilitas keuangan daerah.

Temuan ini selaras dengan tujuan desentralisasi fiskal, di mana daerah diharapkan mampu berdiri secara mandiri dalam hal pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Otonomi Khusus (Otsus), menjadi indikator lemahnya kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, PAD menjadi instrumen vital dalam memperkuat otonomi daerah dan menciptakan tata kelola keuangan yang berkelanjutan. Dalam konteks Papua Barat, meskipun PAD relatif rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia, upaya untuk meningkatkan PAD seperti melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah, optimalisasi retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kemampuan fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, di mana pemerintah daerah sebagai agen yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat (prinsipal) harus mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat lokal.

#### 2. Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderasi

Meskipun secara konseptual kinerja keuangan pemerintah daerah dipandang sebagai faktor yang dapat memperkuat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal ini ditolak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik kinerja keuangan tidak terbukti sebagai variabel moderasi yang signifikan. Artinya, pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal tidak tergantung pada tinggi atau rendahnya kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu daerah mampu merealisasikan PAD sesuai target, atau bahkan melampaui target, hal tersebut belum tentu diikuti dengan peningkatan kemandirian fiskal secara optimal jika kualitas pengelolaan keuangannya tidak didukung oleh tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Ketidaksignifikansi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belanja daerah yang tidak produktif, inefisiensi dalam pengalokasian anggaran, atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, mungkin terdapat kelemahan dalam sistem

pelaporan dan pengendalian internal yang menyebabkan kinerja keuangan tidak mampu memperkuat hubungan yang semestinya. Dengan kata lain, keberadaan PAD saja tidak cukup untuk menjamin kemandirian fiskal apabila tidak disertai dengan manajemen keuangan yang baik. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada efektivitas penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Papua Barat. Artinya, semakin besar PAD yang diperoleh oleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskalnya. Namun, variabel kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terbukti secara statistik mampu memoderasi hubungan antara PAD dengan kemandirian fiskal. Meskipun pengelolaan keuangan memiliki nilai penting secara konseptual, dalam penelitian ini perannya tidak signifikan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal.

Pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat disarankan untuk terus mengoptimalkan penerimaan dari PAD melalui inovasi pajak dan retribusi, serta peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan aset daerah. Selain itu, meskipun kinerja keuangan tidak terbukti sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran tetap perlu ditingkatkan agar PAD yang terkumpul dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, S. D. I. A. Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Makasar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3), 403–416.

Amanah, R. A. R. P. A. L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–20.

Amin, N. F. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31.

Apriliansyah, M. F. (2024). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Di Papua Barat Skripsi.

Daryanti, & Ua, M. A. (2019). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. *Akmen: Akuntansi Dan Manajemen*, 16(3), 433–438. <Http://E-Jurnal.Nobel.Ac.Id/Index.Php/Akmen/Article/View/702%0a> <Http://E-Jurnal.Nobel.Ac.Id/Index.Php/Akmen/Article/Download/702/841>

Deswita, R. Y. (2020). Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (Sentrinov)*, 6(2), 1–8.

Deswita, R. Y. (2024). Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 715–727.

Evlyn, M., & Rahayu, Y. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–15.

Fahrizal, M. A., & Sukartini, N. M. (2024). Flypaper Effect Dana Otonomi Khusus Dan Dana Perimbangan Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 8(2), 1203–1214. <Https://Doi.Org/10.31955/Mea.V8i2.4058>

Faizah, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Kemandirian Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020).

Faizar, A. (N.D.). 5 Provinsi Pad Tertinggi Di Indonesia 2024, Jakarta Berada Di Urutan Pertama,

Pendapatannya Rp 55,66 Triliun.

Farizi, S. M. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (Pada 9 Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013). *Procedia Manufacturing*, 22(1), 1–17.

Frijunita, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( Pad ), Tax Effort , Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 256–269.

Kamilah, N. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Flypaper Effect Sebagai Variabel Moderasi. *Universitas Hasanuddin Makassar*.

Karamoy, H., & Poputra, A. T. (2014). Analisis Panel Atas Pengaruh Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(4), 12–26. <Https://Doi.Org/10.32400/Gc.9.4.6365.2014>

Kiki Zakiah. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget*, 7(2), 364–378.

Marentek, E. E., Ilat, V., & Tinangon, J. (2022). Pengaruh Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Pimpinan Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 13(2), 150–163. <Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Goodwill/Article/Viewfile/43741/38237>

Mulya Firdausy, C. (2017). Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Daerah.

Pramesti, I. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Reni Dwi Apriani, Supami Wahyu Setiowati, A. M. F. I. (2024). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemda Se Jawa Timur Tahun 2020-2022). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 1–12.

Rizka Jafar Darmawati, D. (2024). Pengaruh Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Icor: Journal Of Regional Economics*, 5(1), 44–59.

Siregar, H. A. (2024). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 218–236.

Urfah, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Transfer Ke Daerah (Tkd) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Sikd Kota Batu Tahun 2014-2023). <Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/67228>

Wasil, M., Putri, N. S., Larasati, A., & Mufida, N. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sidoarjao. *Journal Of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 99–109. <Https://Doi.Org/10.26905/Jrei.V1i2.5441>

Wurangian, C. H., & Sannie, K. S. (2025). Tinjauan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 S.D. 2024. Djpb Kemenkeu.

Yayuk Musrini, & Muhammad Aufa. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 221–236.